



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1997 adalah sebesar Rp 99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) terdiri dari :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.153.288.059.069 (sepuluh triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:
- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan
rupiah) dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	26.226.914.356
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp	238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp	518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA	Rp	995.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

TEKNOLOGI	Rp	307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM	Rp	550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp	1.099.507.893.068
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.249.733.644.000

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 35.951.740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor:

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	1.133.343.841.473
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp	1.308.337.575.033
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	2.101.635.614.237
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	197.140.678.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	1.680.743.373.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	5.655.449.321.603
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	3.252.272.271.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp	570.877.880.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp	7.156.401.320.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp	564.512.320.756



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 3.849.211.636.884
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 332.692.258.142
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 1.277.568.563.697
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 1.365.837.073.398
15 SEKTOR AGAMA	Rp 281.967.467.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 554.837.671.129
17 SEKTOR HUKUM	Rp 150.836.177.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 836.812.324.808
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 184.349.463.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 3.496.913.623.174

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp 1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
TENTANG ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 1.017.516.727.734 (Satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp 6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp 7.625.198.524.155 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1996/1997

(dalam rupiah)

Penerimaan pajak	57.339.900.457.441
0110 Pajak penghasilan (PPh)	27.062.110.847.687
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)	20.351.207.294.395
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.413.154.639.483
0210 Penerimaan bea masuk	2.578.881.781.217
0220 Penerimaan cukai	4.262.836.727.393
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor	80.985.987.697
0240 Bea meterai	535.338.217.622
0250 Bea lelang	55.384.961.947
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	20.137.068.462.051
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam	20.137.068.462.051



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	-
	Penerimaan negara bukan pajak	10.153.288.059.069
0410	Penerimaan pendidikan	57.928.970.707
0411	Uang pendidikan	55.421.315.419
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	1.185.272.312
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek	220.000
0419	Penerimaan pendidikan lainnya	1.322.162.976
0480	Penerimaan pendidikan swadana	319.480.773.070
0481	Penerimaan pendidikan swadana	319.480.773.070
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan	26.664.228.464
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	874.535.491
0512	Penjualan hasil perternakan	804.800.761
0513	Penjualan hasil perikanan	386.423.430
0514	Penjualan hasil sitaan	7.303.014.748
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	37.369.011
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	222.193.614
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	10.496.067.986
0519	Penjualan lainnya	6.539.823.423
0520	Penjualan aset tetap	29.698.723.974
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	7.389.620.873
0522	Penjualan kendaraan bermotor	620.696.413
0523	Penjualan sewa beli	18.931.395.182
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	2.757.011.506
0530	Penerimaan sewa	12.392.278.509
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.279.061.145



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	3.263.323.067
0533	Sewa benda-benda bergerak	3.866.896.741
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	982.997.556
0540	Penerimaan jasa I	600.718.099.158
0541	Penerimaan rumah sakit dan kesehatan lainnya	10.394.951.455
0542	Penerimaan tempat hiburan,taman,museum	203.793.138
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	99.140.572.396
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	112.725.551.566
0545	Penerimaan hak dan perizinan	334.467.821.316
0546	Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan	7.348.871.902
547	Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan	10.507.129.795
0548	Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama	4.764.718.722
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	21.164.688.868
0550	Penerimaan Jasa II	750.713.714.052
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	443.294.914.931
0552	Penerimaan iuran hasil hutan,hasil laut, royalti dan denda	130.812.781.985
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	3.898.166.489
0554	Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil	11.064.598.730
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	710.977.542
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	2.107.108.775
0559	Penerimaan jasa lainnya	158.825.165.600
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	30.921.039.516
0561	Bea visa dan paspor	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0562	Bea konsuler	-
0563	Bea Maritim	-
0564	Bea pemeriksaan	-
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan	-
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	-
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	30.921.039.516
0580	Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana	1.695.829.797.368
0581	Penerimaan penjualan swadana	1.920.157.457
0582	Penerimaan sewa swadana	1.343.746.784
0583	Penerimaan jasa swadana	1.692.565.893.127
610	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan	33.291.708.120
0611	Legilisasi tanda tangan	74.721.737
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	13.452.250
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	464.959.656
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	25.397.228.110
0615	Ongkos perkara	1.524.899.513
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	5.816.446.854
0710	Penerimaan dari investasi	5.211.364.314.798
0711	Bagian laba dari BUMN	2.649.852.747.596
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.561.511.567.202
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	66.830.583.796
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	7.219.398.697
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	7.031.453.543
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	36.514.330.044
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	1.696.827.121



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	14.264.628.543
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran berjalan	103.895.848
0820	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	20.570.815.313
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	6.951.966.988
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	2.880.392.842
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	3.432.047.828
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	1.306.138.486
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	5.968.526.424
0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu	31.742.745
0880	Penerimaan lain-lain Swadana	15.860.516.865
0881	Penerimaan lain-lain swadana	15.860.516.865
0890	Penerimaan lain-lain	1.281.022.495.359
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	1.673.780.564
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	9.099.989.999
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi	5.951.011.785
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdsarkan SPM nihil KPKN	461.540.201.190
0899	Penerimaan anggaran lainnya	802.757.511.821
	JUMLAH	87.630.256.978.561



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

0910	Bantuan Program	-
0920	Bantuan Proyek	11.900.086.735.508
	JUMLAH	11.900.086.735.508

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	54.467.377.929
	Jumlah Sektor Industri	54.467.377.929
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	125.072.006.040
02.2	Subsektor Kehutanan	334.807.293.453
	Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan	469.879.299.493
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya	
	Air	12.969.403.368
03.2	Subsektor Irigasi	13.257.510.991
	Jumlah Sektor Pengairan	26.226.914.359



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	117.411.196.055
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	117.411.196.055
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	55.152.109.932
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	29.925.116.059
05.4	Subsektor Keuangan	35.134.442.315.359
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	79.807.200.319
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan	35.299.326.741.669
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	18.615.837.188
06.2	Subsektor Transportasi Darat	17.649.258.221
06.3	Subsektor Transportasi Laut	133.504.024.072
06.4	Subsektor Transportasi Udara	46.025.515.637
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	38.809.555.795
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	254.604.190.913
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	110.287.006.798
07.2	Subsektor Energi	4.143.159.653
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	114.430.166.451
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	31.679.370.850
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	16.849.877.806



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	48.529.248.656
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	9.470.383.555.516
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	52.918.486.326
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	9.523.302.041.842
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	6.973.543.034
10.2	Subsektor Tata Ruang	172.987.500.908
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	179.961.043.942
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	3.366.230.924.757
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	244.182.452.797
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	73.689.310.413
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	8.036.531.886
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.692.139.219.853
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	238.778.014.178



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	238.778.014.178
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	93.682.599.603
13.2	Subsektor Kesehatan	424.648.553.608
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	518.331.153.211
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	8.577.175.233
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	3.093.937.999
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	11.671.113.232
15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	165.873.481.098
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	829.819.725.929
	Jumlah Sektor Agama	995.693.207.027
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	200.331.914.948
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26.628.908.163
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	1.412.246.175
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	78.970.672.848
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	307.343.742.134
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	473.394.355.948
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	77.275.107.823



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	Jumlah Sektor Hukum	550.669.463.771
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	3.581.324.933.179
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	227.755.925.237
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	3.809.080.858.416
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	66.140.482.474
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	754.850.889.956
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	278.516.520.638
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.099.507.893.068
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	5.249.733.644.000
20.3	Subsektor Pendukung	-
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	5.249.733.644.000
	JUMLAH	62.561.086.530.199



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	1.004.617.898.477
	Jumlah Sektor Industri	1.004.617.898.477
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	1.019.058.852.033
02.2	Subsektor Kehutanan	8.488.455.000
	Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan	1.027.547.307.033
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	368.499.502.714
03.2	Subsektor Irigasi	878.305.937.603
	Jumlah Sektor Pengairan	1.246.805.440.317
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	135.627.426.594
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	135.627.426.594
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	25.850.928.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	40.281.732.702
05.3	Subsektor pengembangan Usaha Nasional	1.136.492.434.592
05.4	Subsektor Keuangan	2.529.980.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	81.656.624.869



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	1.286.811.700.163
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.280.287.172.600
06.2	Subsektor Transportasi Darat	320.819.933.714
06.3	Subsektor Transportasi Laut	221.614.912.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	184.421.238.749
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	13.331.255.000
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	4.020.474.512.063
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
07.1	Subsektor Pertambangan	42.818.907.000
07.2	Subsektor Energi	841.074.477.093
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	83.893.384.093
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
08.1	Subsektor Pariwisata	43.693.022.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	38.250.817.422
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	81.943.839.422
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.534.350.543.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.024.101.907.000
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	6.558.452.450.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	261.429.917.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

10.2	Subsektor Tata Ruang	60.246.154.000
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	321.676.071.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	2.727.195.006.215
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	124.487.843.577
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	65.506.398.500
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	42.917.710.000
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	2.960.106.958.292
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	313.160.232.800
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	313.160.232.800
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	91.809.569.850
13.2	Subsektor Kesehatan	904.019.613.947
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	16.770.749.000
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.012.599.932.797



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	520.086.485.280
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	32.017.510.000
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	552.103.995.280
15	SEKTOR AGAMA	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	55.051.113.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	152.119.873.000
	Jumlah Sektor Agama	207.170.986.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	203.060.053.152
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	83.181.833.000
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	67.213.898.000
16.4	Subsektor Kelautan	27.404.699.500
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	23.265.005.462
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	112.159.656.000
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	516.285.145.114
17	SEKTOR HUKUM	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	10.992.141.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	40.784.805.000
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	97.100.542.000
	Jumlah Sektor Hukum	148.877.488.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
18.1	Subsektor Aparatur Negara	598.685.949.408
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	27.446.776.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	626.132.725.408
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
19.1	Subsektor Politik	20.462.494.100
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	10.827.304.000
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	117.204.962.468
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	148.494.760.568
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	741.861.000.000
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	246.536.877.897
20.3	Subsektor Pendukung	10.473.589.310
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	998.871.467.207
	JUMLAH	24.051.653.720.628



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
01.1	Subsektor Industri	128.725.943.000
	Jumlah Sektor Industri	128.725.943.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
02.1	Subsektor Pertanian	280.674.590.000
02.2	Subsektor Kehutanan	115.678.000
	Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan	280.790.268.000
03	SEKTOR PENGAIRAN	
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	493.909.086.440
03.2	Subsektor Irigasi	360.921.087.480
	Jumlah Sektor Pengairan	854.830.173.920
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	61.513.252.000
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	61.513.252.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	19.429.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	-
05.3	Subsektor pengembangan Usaha Nasional	168.935.509.000
05.4	Subsektor Keuangan	223.080.038.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	1.896.697.000
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	339.931.673.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan		877.087.991.540
06.2	Subsektor Transportasi Darat		325.868.942.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut		281.048.846.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	1	48.460.526.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika		
	Pencarian dan Penyelamatan (SAR)		2.508.504.000
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika		1.634.974.809.540
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
07.1	Subsektor Pertambangan		275.605.031.000
07.2	Subsektor Energi		2.092.773.856.000
	Jumlah Sektor Pertambangan & Energi		2.368.378.887.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
08.1	Subsektor Pariwisata		1.315.456.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi		487.618.585.000
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi		488.934.041.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah		471.033.887.958
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan		126.914.983.000
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		597.948.870.958
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup		198.751.664.000
10.2	Subsektor Tata Ruang		44.084.585.756
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		242.836.249.756



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	836.119.450.592
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	52.953.945.000
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	9.083.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	22.200.000
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	889.104.678.592
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	19.532.025.342
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	19.532.025.342
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	9.818.752.000
13.2	Subsektor Kesehatan	255.149.878.900
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	-
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja	264.968.630.900
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	807.705.609.118
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.027.469.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	813.733.078.118
15	SEKTOR AGAMA	
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	63.383.018.000
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	11.413.463.000
	Jumlah Sektor Agama	74.796.481.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	24.737.063.015
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	8.808.123.000
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3.344.928.000
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan	-
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	1.662.412.000
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	38.552.526.015
17	SEKTOR HUKUM	
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.958.689.000
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	-
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	-
	Jumlah Sektor Hukum	1.958.689.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	141.405.244.400
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	69.274.355.000
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	210.679.599.400
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	19.1 Subsektor Politik	8.458.164.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	-
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	27.396.539.000
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	35.854.703.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	-
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	2.498.042.155.967
20.3	Subsektor Pendukung	-
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	2.498.042.155.967
	JUMLAH	11.900.086.735.508

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3788